

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Fuad Usfa. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Universitas Negeri Malang Press. Malang.
- Adami Chazawi. 2021. *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2018. *Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa*. Jakarta
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Grafindo. Jakarta
- Gomgom T.P. Siregar. 2020. *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*. Penerbit Refika. Medan.
- Hanafi Amrani. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Pers. Yogyakarta
- Harahap dan Sofyan Syafri. Drs. 2007. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*,. Cetakan ke-7. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hartoyo, Luviana, dkk. 2015. *Peluncuran dan Diskusi Modul Panduan Media Meliput LGBT*. Yayasan YJP. Jakarta.
- I. S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- K. Wantjik Saleh. 1998. *Kehakiman dan Keadilan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Lamintang.1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. cet VII. Sinar Grafika. Jakarta.

- Muh. Iqbal.S.H. 2019. *Hukum Pidana*. Unpam Press. Banten.
- Suci Haryanti. 2013. *Pengantar Statistika 1*. Media Sains Indonesia. Bandung.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Sriyana, Wahyu Wagiman. 2012. *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2014. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Untung Yuwono. 2017. *Surat Bisnis Yang Dituduh Mencemarkan Nama Baik : Bagaimana Linguis Bekerja Sebagai Saksi Ahli Di Indonesia*. Jurnal Universitas Indonesia. Depok.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

JURNAL

- Mudzakir. 2004. *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*. Yogyakarta
- Ruslan Abdul Gani. *Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri*. Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2
- Yuwono, Untung. 2020. *Surat Bisnis yang Dituduh Mencemarkan Nama Baik: Bagaimana Linguis Bekerja sebagai Saksi Ahli di Indonesia*. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Universitas Indonesia. Depok

SKRIPSI

- Muh Nur Arisakti. *Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis Dan Mazhab Fikih*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2021. Hlm. 57
- Muh. Riza Albani. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medeplager)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang
Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE),

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi
Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik
Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor Kb/2/Vi/2021 terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),

Media Online

Abdul Azis Dumpa.2017. *Yusniar Bebas dari Jerat Kriminalisasi, Bukti UU ITE Bermasalah*. LBH Makassar, diakses dari <https://lbhmakassar.org/press-release/yusniar-bebas-dari-jerat-kriminalisasi-bukti-uu-ite-bermasalah/> pada tanggal 7 Agustus 2022, Pukul 20.18



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
Jalan P. Kemerdekaan Km. 16 Makassar 90241

Makassar, Maret 2023

Nomor : B/1932 /III/LIT.2.1./2023/Ditreskrimsus
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : -
Perihal : penyampaian telah melaksanakan penelitian.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

di

Makassar

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : 1993/UN4.5.1/PT.00/2023 tanggal 9 Maret 2023 tentang penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI AINUN RESKIA UTAMI
Nomor Pokok : B011181519
Program Study: ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
Alamat : MAKASSAR

telah melaksanakan penelitian pada Ditreskrimsus Polda Sulsel pada tanggal 22 November 2022 s.d. 10 Maret 2023 dengan judul penelitian "ANALISIS PERANAN KETERANGAN AHLI TATA BAHASA DALAM MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (POLDA SULSEL)".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
DIRRESKRIMSUS



GANY ALAMSYAH HATTA, S.IK.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79010762

Tembusan:

1. Kapolda Sulsel.
2. Irwasda Polda Sulsel.
3. Karo SDM Polda Sulsel.